



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 79 /B.07/HK/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELEPASAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, KELURAHAN WAY DADI BARU, DAN KELURAHAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat persetujuan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 27/DPRD-LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Masyarakat;
3. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Hal Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas ± 89 hektar yang terletak di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang kondisinya telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam pelepasannya secara arif, koordinatif dan bijaksana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Terpadu Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
3. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/S1 tanggal 16 Oktober 1994 seluas 626.391 m²;
4. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 2/S1 tanggal 16 Oktober 1994 seluas 238.606 m²;
5. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 3/S1 tanggal 16 Oktober 1994 seluas 21.275 m²;
6. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Nomor : 028/758/07/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pelepasan/Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TERPADU PELEPASAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, KELURAHAN WAY DADI BARU, DAN KELURAHAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung Seluas ± 89 Hektar di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud, pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka langkah-langkah pelepasan aset tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung terkait pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. melakukan pemantauan dan pembahasan terhadap perkembangan pelaksanaan pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan guna pelaksanaan lebih lanjut pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan urusan administrasi dan keuangan dalam rangka pelepasan aset tanah dimaksud;
 - b. menghimpun data-data yang berkaitan dengan pelepasan aset tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung; dan
 - c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi dan rapat pembahasan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Investigasi Aset Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.04.02.37.23.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 1 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kapolda Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di telukbetung;
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.07/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PELEPASAN ASET HAK PENGELOLAAN LAHAN
(HPL) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ±89 DI KELURAHAN WAY DADI,
KELURAHAN WAY DADI BARU, DAN KELURAHAN KORPRI JAYA
KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : Wakil Gubernur Lampung
- III. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- VI. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- VII. Sekretaris : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Anggota : Unsur Kepolisian Daerah Lampung
 - 1. AKBP Irawan (Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam)
 - 2. Kopol Sukandar (Kasubdit Polmas Dit Binmas)
 - 3. Kopol Zulman Topani (Kanit II Subdit Ekonomi)
 - 4. Briptu Andry Valiandra (Banit II Subdit Ekonomi)Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung
 - 1. Sugeng Hariadi, S.H., M.H. (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara)
 - 2. Fahmilul Amri, S.H. (Kasi Perdata Asdatun)Unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung
 - 1. Endi Purnomo, S.H., M.H (Kasi Penanganan Perkara Pertanahan)
 - 2. Joko Sigit, S.Si (Kasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah)Unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
 - 1. Kadri Hartono, S.SIT (Kasi Pengadaan Tanah)
 - 2. Resi Indreswari S, SP (Kasubsi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah)Unsur Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
 - 1. Yuliadi Purawibawa (Kabid Penilaian)
 - 2. Ismu Bintoro (Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara)Unsur Korem 043 Garuda Hitam
 - 1. Serma Supriyanto (Baurbekang Silogrem 043 Gatam)
 - 2. Serma Ngatino (Bamin Fasjasa Denzibang 4/II)Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
 - 1. Iwan Arwin Setyawan, S.T (Pengawas Pemerintah Muda)
 - 2. Ahmad Hernawan, SP. (Fungsional Pengawas Pemerintah)Unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 - 1. Marindo Kurniawan, S.T., M.M (Kabid Anggaran)
 - 2. Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M (Kabid Perbendaharaan)Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 1. Drs. A. Rozali. MS. (Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung)
 - 2. Ida Sari Yorita, S.E. (Kasubbid Penerimaan Retribusi)

Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

1. Lakoni, S.H., M.H. (Kabid Penegakan Perundang-Undangan)
2. Herman Naidi, S.H. (Kasi Pembinaan dan Penyuluhan)

Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

1. Puadi Jailani, S.H., M.H. (Kabag Bantuan Hukum)
2. Helman Nopiar Taufik, S.H. (Kasubbag Non Litigasi)

Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

1. Ir. Indra AA Minpaduka (Kabag Bina Administrasi Kewilayahan)
2. Drs. Azharuddin (Kasubbag Pertanahan)

Unsur Polresta Bandar Lampung

1. Kompol Ujang Supriyanto, S.E (Kabag Ops Polresta Bandar Lampung)
2. Kompol E. Siallagan, S.H., M.H. (Kasat Intelkam Polresta Bandar Lampung)

Unsur Pemerintah Kota Bandar Lampung

1. Drs. Sukarma Wijaya (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
2. Hidayat Ismet, S.E., M.M (Kabag Pemerintahan)
3. Hardiansyah, S.E., M.M (Kabid Pendaftaran dan Penetapan BPPRD Kota Bandar Lampung)

Unsur Kecamatan Sukarame

1. Ahmad Barmawi (Camat Sukarame)
2. Udo Panji Ismoyo, S.STP., M.M. (Sekcam Sukarame)
3. Dain Hermawan, S.A.B. (Lurah Way Dadi)
4. Lurah Way Dadi Baru
5. Lurah Korpri Jaya

Unsur Koramil Tanjung Karang Timur

1. Mayor. Inf. Sutoto (Danramil Tanjung Karang Timur)
2. Pelda Hendra (Babinsa Way Dadi)
3. Sertu Yusron (Babinsa Way Dadi Baru)
4. Serda Arpai (Babinsa Korpri Jaya)

Unsur Polsek Sukarame

1. Kompol Mulyadi, AR. (Kapolsek Sukarame)
2. Bhabinkamtibmas Way Dadi
3. Bhabinkamtibmas Way Dadi Baru
4. Bhabinkamtibmas Korpri Jaya

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁷⁵ /B.07/HK/2019
TANGGAL : ¹⁵ - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PELEPASAN ASET TANAH
HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS
± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, KELURAHAN WAY DADI BARU, DAN
KELURAHAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

- | | | | |
|------|-----------------|---|--|
| I | Ketua | : | Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| II. | Wakil Ketua I | : | Kabag Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| III. | Wakil Ketua II | : | Kabag Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| IV. | Wakil Ketua III | : | Kabag Penatausahaan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| V. | Sekretaris | : | Kasubbag Pemeliharaan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| VI. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kasubbag Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung2. Kasubbag Pengawasan dan Penyelesaian Masalah Sengketa Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung3. Kasubbag Pembinaan SDM dan Pengembangan Teknologi Informasi Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung4. Sri Manila S.IP (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)5. Yudha Mahardika, S.T., M.M. (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)6. Robby Muchtar, S.E., M.M (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)7. Siti Hadijah, S.E., M.M. (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)8. Erpani (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)9. Musanip (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)10. Anggi Prapanca, S.Kom. (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)11. Muhammad Mainaki Riano, S.STP. (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)12. Raden Atmaja (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)13. Rusmansyah (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)14. Suherman Sawiran (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)15. Hengky Irawan Susilo (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) |

16. Prayitno (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
17. Haris Setiawan (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
18. Sudarlina Febri Kusumanti (Pelaksana pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
19. Marsiah (PTHL pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
20. Cendiko Eriando (PTHL pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
21. Sahmin Saleh (PTHL pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO